

TABLE OF CONTENT

REFACE

iii

TABLE OF CONTENT

iv

KEYNOTE SPEAKER

NATIONAL LANGUAGE POLICY IN MALAYSIA

1

Abidin Burhan (Malaysia)

INVITED SPEAKERS

PUBLIC POLICY SINGAPORE STYLE

5

Volia Fibriyani (Singapore)

BUREAUCRACY REFORM IN BRUNEI DARUSSALAM:

AN INTRODUCTION TO GOVERNMENT

14

Samad Zakaria (Brunei Darussalam)

ADMINISTRATION REFORM, NATIONAL POWER,

AND THE DEVELOPMENT OF THE NATIONS

18

Edo Prasjo (Indonesia)

STRENGTHENING INFORMAL INSTITUTION OF RUBBER FARMING

COMMUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL CAPITAL

26

Agijanto & Syofian (Indonesia)

END USER' PERCEPTION TOWARD USABILITY OF SMARTPHONE BASED

DATA COLLECTION SYSTEM DURING PERFORMANCE MONITORING

ACCOUNTABILITY 2020 (PMA2020) SURVEY IN INDONESIA

34

Agusri, Linnea A Zimmerman, & Nur Laila Mellani (United States of America & Indonesia)

Chapter 1

ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY

LOCAL WISDOM OF KEPENGHULUAN MAMUGO

IN LAND AND FOREST FIRE PREVENTION

47

Febri Yuliani

REGIONAL GOVERNMENT POLICY ON LAND PROBLEMS IN THE

PROPERTY RIGHTS OF PLANTATION ENTERPRISES

51

Musbianto

POLITICAL DYNAMICS INSTITUTIONAL OF FARMERS IN RIAU

60

Chairul Anwar

THE SOCIETY PERCEPTION TOWARD THE PROGRAM IMPLEMENTATION OF

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OF PT. MEDCO E&P

INDONESIA OF KAMPAR AREA

67

Swis Tantoro

EVALUATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION PROGRAM (ADD) ON

VILLAGE EMPOWERMENT

80

Enili Rusli & Mayarni



6	SYNERGIES OF PROGRAM THE COOPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SIAK <i>Arizal</i>	88
7	STRATEGIES FOR MANAGING AND RESOLVING SOCIAL CONFLICT <i>Abdul Sadad</i>	93
8	INEQUALITY OF RUBBER FARMER INCOME IN RAMBAI ISLAND KAMPAR DISTRICT OF RIAU <i>Soreia Khaswarina & Eliza</i>	99
9	IMPLEMENTATION MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM <i>Mayzi Periyanto, Adianto, & Hasim Asari</i>	104
10	IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION KAMPAR REGENCY NO. 1 YEAR 2013 ABOUT US READING AL-QUR'AN <i>Mashud</i>	115
11	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 18 YEAR 2008 REGARDING WASTE MANAGEMENT <i>Eniawati</i>	119
Chapter 2		
GOOD GOVERNANCE AND BUREAUCRATIC REFORM		
1	THE INFLUENCE OF COORDINATION TOWARD SERVICE QUALITY AT THE TATA SUMI WIBAWA REGIONAL WATER UTILITY COMPANY <i>Ilka Rachmanawati & Farhana</i>	125
2	NEW PUBLIC MANAGEMENT IN A GOVERNMENT REFORM FOR GOOD GOVERNANCE <i>Analin Nantima Primasari</i>	130
3	RELATIONSHIP BUILDING REFORMATION WITH MALADMINISTRATION BEHAVIOR IN PEKANBARU CITY <i>Radi Wasyudi & Muammar Alkadafi</i>	138
4	CIVIL SERVANT BUREAUATION IN REGIONAL GOVERNMENT TO COMPETE GLOBAL COMPETITION <i>Ihsan Simon & Kariaman Sinaga</i>	146
5	DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES <i>Fitriani, Sundari Nasution</i>	154
6	QUALITY OF PUBLIC SERVICES <i>Latipah</i>	160
7	EFFECTIVENESS OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PT. ARARA ABADI <i>Sofia Azzahra</i>	169
8	ROLE OF GOVERNMENT AS A STRATEGIC PARTNER IN THE IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL RELATIONS <i>Geovani Meiwanda & Frini Karina Andini</i>	174
9	ROLE OF DEPARTMENT OF DEPARTMENT IN PROVINCY ROADS <i>Fitriana Rustam</i>	181
10	WATER SUPPLY SERVICE FOR POOR SOCIETY BY WATER SUPPLY AND SANITATION WITH COMMUNITY BASED PROGRAM <i>Fitriana</i>	187
11	ECOCLOGY APPROACH IN TOURISM DESTINATION GOVERNANCE <i>Fitriana Sutistyani</i>	192
12	ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN STRENGTHENING CAPABILITIES OF ORGANIZATION OF THE REGIONAL ECONOMIC ERA GOVERNMENT <i>Fitriana Farmizi Yusa</i>	206

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, yang telah dipublikasikan dalam sumber ini, tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, yang telah dipublikasikan dalam sumber ini, tanpa mencantumkan sumber.



IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 18 YEAR 2008 REGARDING WASTE MANAGEMENT

Ernawaty

Faculty of Social Sciences and Political Science University of Riau

Abstract: The consumption patterns of high society will impact on the amount of production waste generate, no exception to that occurring in the District North Pekanbaru. The District Pekanbaru as one of the district in the Pekanbaru City lot of rubbish both derived from household waste and non-household. The trashy are not managed properly will lead to a variety of diseases that can be contracted in the community and reduce the beauty of the city. Therefore, Pekanbaru municipality passed a law number 18 Of 2008 on waste management. Purpose of this research is to investigate the implementation of regional regulation number 18 Of 2008 on waste management in the district of the Pekanbaru City. Used theoretical concepts using theoris Edwards that covers aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses qualitative research methods to study, descriptive information. In the information collection reseacers use interviewing technique, observation and documentation. By using purposive sampling. The result of this research showed that the implementation of legislation waste is still not running optimally because there are still some obstacles. Factor inhibiting factor in the implementation of Regional Regulation No. 18 of 2008 on waste management in the district of Pekanbaru is policy Implementor of Garbage Worker Performance remains low. Facilities and infrastructure that is trash, Motor Tcycle that is still not enough and Public Participation is still low.

Keywords: Communication, resource, disposition, bureaucratic structure.

I. PENDAHULUAN

Problema sampah merupakan isu penting di setiap perkotaan yang memerlukan penanganan serius dan profesional, salah satunya di Kota Pekanbaru. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, diharapkan sampah dapat dikelola dengan baik, namun kenyataannya volume timbunan sampah semakin tinggi di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008. Konsep teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Edwards yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, pengisian kuisioner kepada responden, dan studi literature. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan melibatkan yang terlibat pada penelitian ini adalah dinas kebersihan dan pertamanan Kota Pekanbaru, beserta staf bagian pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, indikator variabel komunikasi disini adalah komunikasi pengelola dengan masyarakat mengenai yang baik, tidak membuang sampah sembarangan, sumber daya yang disini adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementor atau pembuat kebijakan disini adalah sikap para implementor atau pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang telah dibuat, struktur birokrasi disini adalah para pejabat yang mengurus sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak boleh untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik.

2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta.

pembagian tugas yang jelas dari orang-orang yang terdapat dalam struktur birokrasi tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan diberi wewenang sebagai pengelola sampah karena sampah sudah menjadi permasalahan yang serius, jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, menimbulkan bau yang tidak sedap. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya timbunan sampah. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi volume timbunan sampah semakin tinggi.

Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Mengenai Pengelolaan Sampah kepada Instansi terkait, petugas operasional sampah dan masyarakat. Komunikasi ini dilakukan melalui pertemuan atau rapat antara implementor/para pembuat kebijakan, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Tanggapan responden mengenai komunikasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan Sampah dapat dijelaskan pada tabel V.1 sebagai berikut :

Tabel.1 Distribusi tanggapan responden mengenai komunikasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Ada dilakukan	20	25,31
2.	Kurang dilakukan	32	40,51
3.	Tidak dilakukan	27	34,17
	Jumlah	79	100,00

Dari distribusi tanggapan responden pada tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai komunikasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu sebanyak 32 orang responden (40,51%) yang memberikan tanggapannya. Dan tanggapan responden yang mengatakan tidak melakukannya komunikasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 27 orang responden (34,17%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya tanggapan responden mengenai komunikasi dalam mengimplementasikan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada dilakukan hanya 20 orang (25,31%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian tanggapan responden mengenai komunikasi dalam mengimple-mentasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang dilakukan sebanyak 32 orang (40,51%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian ini dikarenakan kurangnya komunikasi antar implementor/ pembuat kebijakan dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat.



2. Sumber Daya

Sumber daya pada penelitian ini adalah sumber daya para implementor/ pembuat kebijakan diunajau dari kemampuan dalam membuat kebijakan, mulai dari perencanaan dalam menyusun kebijakan, sarana dan prasarana angkutan sampah, sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran terhadap sampah yang dibuang dengan sembarangan.

Dari hasil penelitian diperoleh distribusi tanggapan responden mengenai sumber daya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi tanggapan responden mengenai sumber daya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru

No		Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	a	Memilik Sdm	23	29,11
		Kurang memiliki Sdm	30	37,98
		Tidak memiliki Sdm	26	32,91
		Jumlah	79	100,00

Dari distribusi tanggapan responden pada tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai sumber daya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang memiliki sumber daya manusia para implementor/ pembuat kebijakan yaitu sebanyak 30 orang responden (37,98%) yang memberikan tanggapannya. Dan tanggapan responden yang mengatakan tidak memiliki sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada 26 orang responden (32,91%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya tanggapan responden mengenai implementor tidak memiliki sumber daya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada 23 orang responden (29,11%) yang memberikan tanggapannya.

Demikian tanggapan responden mengenai sumber daya implementor/ pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang kurang memiliki sumber daya yakni sebanyak 30 orang (37,98%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya implementor/ pembuat kebijakan, para implementor kurang membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum kebijakan dibuat.

3. Disposisi

Disposisi pada penelitian ini adalah sikap yang dimiliki oleh para implementor/ pembuat kebijakan, artinya apakah kebijakan yang dibuat mendapat respon dari masyarakat atau masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Dari hasil penelitian diperoleh distribusi tanggapan responden mengenai disposisi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel. 3 Distribusi tanggapan responden mengenai disposisi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru

No	Katagori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Adanya respon	19	24,25
2.	Kurang adanya respon	40	50,63
3.	Tidak adanya respon	20	25,31
	Jumlah	79	100,00

Dari distribusi tanggapan responden pada tabel V.3 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai disposisi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang memiliki respon dari masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu sebanyak 40 orang responden (50,63%) yang memberikan tanggapannya. Dan tanggapan responden yang mengatakan tidak memiliki respon dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 20 orang responden (25,31%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya tanggapan responden mengenai implementor adanya respon masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada 19 orang responden (24,05%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian tanggapan responden mengenai disposisi dalam mengimple-mentasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang memiliki respon dari masyarakat yakni sebanyak 40 orang (50,63%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian hal ini dikarenakan kurang seriusnya para implementor/ pembuat kebijakan, dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pekanbaru mengenai arti pentingnya pengelolaan sampah yang baik, dan dapat menambah pendapatan keluarga.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah para pengelola kebijakan yang pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pengelola disini adalah Dinas Kebersihan dan Peratamanan Kota Pekanbaru, mulai dari perencanaan, sarana dan prasarana, armada angkutan sampah, jumlah petugas oprasional angkutan sampah, dan jadwal pengangkutan sampah.

Dari hasil penelitian diperoleh distribusi tanggapan responden mengenai struktu birokrasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel. 4 Distribusi tanggapan responden mengenai struktur birokrasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru

No	Katagori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sesuai	18	22,78
2.	Kurang sesuai	38	48,10
3.	Tidak sesuai	23	29,11
	Jumlah	79	100,00



Dari distribusi tanggapan responden pada tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai struktur birokrasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru ternyata kurang sesuai dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu sebanyak 38 orang responden (48,10%) yang memberikan tanggapannya. Dan tanggapan responden yang mengatakan tidak sesuai dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 23 orang responden (29,11%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya tanggapan responden mengenai kesuaiannya para implementor dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada 14 orang responden (22,78%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian tanggapan responden mengenai struktur birokrasi para implementor dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru kurang sesuai dalam pelaksanaannya yakni sebanyak 38 orang (48,10%) yang memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian hal ini dikarenakan para implementor/pembuat kebijakan, kurang memiliki komitmen, kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dari distribusi tanggapan responden dapat disimpulkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru

No	Indikator	baik	Kurang baik	Tidak baik	jumlah
1.	Komunikasi	20 (25,31%)	32 (40,51%)	27 (19,23%)	79 (100,00)
2.	Sumber daya manusia	23 (29,11%)	30 (37,98%)	26 (32,91%)	79 (100,00)
3.	Disposisi	19 (24,05%)	40 (50,63%)	20 (25,31%)	79 (100,00)
4.	struktur birokrasi	18 (22,78%)	38 (48,10%)	23 (29,11%)	79 (100,00)
	Jumlah	80	140	96	316
	Rata-rata	20 (25,31%)	35 (44,30%)	24 (30,38%)	79 (100,00)

Dari tabel tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan bahwa dari tanggapan responden ternyata kurang baik yakni sebanyak 32 orang responden (40,51%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya pada indikator sumber daya manusia pada kategori kurang baik yakni sebanyak 30 orang responden (37,98%) yang memberikan tanggapannya, untuk indikator disposisi tanggapan responden ternyata kurang baik yaitu sebanyak 40 orang responden (50,63%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya pada indikator struktur birokrasi tanggapan responden juga ternyata kurang baik yaitu sebanyak 38 orang (48,10%) yang memberikan tanggapannya.

Dengan demikian dari hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melalui indikator-indikator yang digunakan pada penelitian ini ternyata dari tanggapan responden termasuk pada kategori "kurang baik" yakni sebanyak 35 orang responden (44,30%) yang memberikan tanggapannya dari 79 orang responden secara keseluruhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak tanpa izin dari Universitas Riau.

IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ternyata dalam pelaksanaannya kurang baik atau kurang optimal. Adapun faktor-faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dikarenakan implementor kebijakan yaitu kurangnya perencanaan dalam pembuatan kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh para implementor, kurang seriusnya para implementor dalam membuat kebijakan, hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah kurang sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah seperti kurangnya armada pengangkutan sampah, kurangnya tenaga operasional sampah, kurangnya TPS maupun TPA tempat pembuangan sampah, kurangnya peralatan dalam pengangkutan sampah, dari hasil penelitian banyaknya timbunan sampah di Kota Pekanbaru kurang sesuai dengan jumlah armada angkutan sampah, sempitnya lahan TPA dan TPS untuk pembuangan sampah, termasuk peralatan untuk para petugas operasional sampah.

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi para implementor pembuat kebijakan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah adalah merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal ini mengakibatkan banyaknya timbunan sampah baik di rumah pemukiman penduduk, pasar, rumah makan, ruko-ruko dan sebagainya.

REFERENSI

- Amistino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Public*. Bandung, cv. Alfabeta.
- Isyana, Irfan. 2000. *Pengambilan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Katikawan, 2007. *Pengelola Lingkungan Hidup Yang Sehat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Nelaka, Amos. 2008. *Kesehatan Lingkungan*. Rineka Cipta Jakarta
- Nuroho, Riant, 2011. *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Nuroho, Riant, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT. Gramedia Jakarta
- Nuroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Utamiyo, C, 2012, *Studi Komposisi Sampah Perkotaan Pada Tingkat Rumah Tangga*, Jakarta.
- Widarsono, AG, 2008. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep dan Teori Aplikasinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Widagmono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika Jakarta
- Wahjono, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lemlit UNPAD. Bandung.

